



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : B-08450/P.01/DL.03.01/05/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penawaran Pelatihan Jabatan  
Fungsional Perencana Ahli Pertama  
Tahun 2024

Jakarta, 20 Mei 2024

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi/Kementerian/Lembaga
2. Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) pada tahun 2024 akan menyelenggarakan pelatihan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan fungsional perencana Ahli Pertama baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan sikap yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional perencana secara profesional.

Proses pendaftaran pelatihan JFP Ahli Pertama dibuka hingga tanggal **28 Juni 2024**. Adapun ketentuan umum pendaftaran, persyaratan, serta mekanisme pelatihan dapat dilihat pada lampiran surat penawaran ini.

Dapat kami sampaikan bahwa Pusbindiklatren tidak memungut biaya apapun kepada peserta dalam proses pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan pelatihan, kecuali pembiayaan yang tercantum dalam surat kesediaan *cost-sharing* keikutsertaan pelatihan. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan pelatihan JFP Ahli Pertama tahun 2024 dapat diperoleh melalui:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas  
Kelompok Kerja Pelatihan (Pokja Pelatihan)  
Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telepon: +6221 31928-280, 31928-285  
Pesan WhatsApp: +62 811-7628-280  
Surel: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)  
Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Program Studi/Pelaksana Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama.



Lampiran 2: Daftar Penerima Undangan  
Nomor : B-08450/P.01/DL.03.01/05/2024  
Tanggal : 20 Mei 2024

#### **I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
13. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
14. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
15. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
21. Badan Pusat Statistik (BPS)
22. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
23. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
24. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
26. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
28. Kejaksaan Agung
29. Kementerian Agama
30. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

32. Kementerian Dalam Negeri
33. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
34. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
35. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
36. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Kementerian Kelautan dan Perikanan
38. Kementerian Kesehatan
39. Kementerian Ketenagakerjaan
40. Kementerian Keuangan
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika
42. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
46. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Kementerian Luar Negeri
49. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
50. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
53. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
54. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
55. Kementerian Perdagangan
56. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
57. Kementerian Perhubungan
58. Kementerian Perindustrian
59. Kementerian Pertahanan
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Sekretariat Negara
62. Kementerian Sosial
63. Kepolisian Negara Republik Indonesia
64. Komisi Aparatur Sipil Negara
65. Komisi Pemberantasan Korupsi
66. Komisi Pemilihan Umum

67. Komisi Yudisial
68. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
69. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
70. Mahkamah Agung
71. Mahkamah Konstitusi
72. Ombudsman Republik Indonesia
73. Otoritas Ibukota Negara
74. Perpustakaan Nasional
75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Kabinet
77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
78. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
79. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)
80. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

## **II. SETDA/BADAN KEPEGAWAIAN/BKPSDM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:**

### **1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

### **2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara

- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

### **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang

- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

#### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

#### **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

#### **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

#### **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko

- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

#### **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

#### **9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

#### **10. Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro



## **11. Provinsi Banten**

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

## **12. Provinsi Jawa Barat**

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

## **13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

## **14. Provinsi Jawa Tengah**

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemasang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

## **15. Provinsi Jawa Timur**

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang

- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

#### **16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

#### **17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

#### **18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah

- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

#### **19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

#### **20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

#### **21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

## **22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

## **23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

## **24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

## **25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

## **26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
  
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

## **27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

## **28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol

- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

## **29. Provinsi Sulawesi Utara**

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

## **30. Provinsi Sulawesi Barat**

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

## **31. Provinsi Maluku**

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

## **32. Provinsi Maluku Utara**

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur

- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

### **33. Provinsi Papua**

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Mamberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi
- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

### **34. Provinsi Papua Barat Daya**

- 34.1. Kabupaten Mamberamo
- 34.2. Kabupaten Raja Ampat
- 34.3. Kabupaten Sorong
- 34.4. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.5. Kabupaten Tambrauw
- 34.6. Kota Sorong

### **35. Provinsi Papua Barat**

- 35.1. Kabupaten Fakfak
- 35.2. Kabupaten Kaimana
- 35.3. Kabupaten Manokwari
- 35.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 35.5. Kabupaten Maybrat
- 35.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 35.7. Kabupaten Teluk Bintuni
- 35.8. Kabupaten Teluk Wondama

### **36. Provinsi Papua Selatan**

- 36.1.1. Kabupaten Merauke
- 36.1.2. Kabupaten Boven Digoel
- 36.1.3. Kabupaten Mappi
- 36.1.4. Kabupaten Asmat

### **37. Provinsi Papua Tengah**

- 37.1.1. Kabupaten Nabire
- 37.1.2. Kabupaten Puncak Jaya
- 37.1.3. Kabupaten Paniai
- 37.1.4. Kabupaten Mimika
- 37.1.5. Kabupaten Puncak
- 37.1.6. Kabupaten Dogiyai
- 37.1.7. Kabupaten Intan Jaya
- 37.1.8. Kabupaten Deiyai



### **38. Provinsi Papua Pegunungan**

- 38.1.1. Kabupaten Jayawijaya
- 38.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 38.1.3. Kabupaten Yahukimo
- 38.1.4. Kabupaten Tolikara
- 38.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 38.1.6. Kabupaten Yalimo
- 38.1.7. Kabupaten Lanny Jaya
- 38.1.8. Kabupaten Nduga

Lampiran 3 : Ketentuan & Syarat

Nomor : B-08450/P.01/DL.03.01/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN  
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
AHLI PERTAMA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Pendaftaran pelatihan fungsional perencana ahli pertama dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di <https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar> kemudian dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja.
2. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dilaksanakan secara *Hybrid* mulai Juli-Oktober 2024;
3. Bagi para calon peserta pelatihan yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum terpanggil diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dimaksud;
4. Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas;
5. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
6. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti pelatihan dan sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar;
7. Apabila terdapat perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui <https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>;
8. Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana dengan sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri);
9. Surat pendaftaran disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Kelompok Kerja Pelatihan Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat – 10320, selambat-lambatnya tanggal **28 Juni 2024** (cap pos) dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;

**Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dapat diperoleh melalui Kelompok Kerja Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas, melalui nomor telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan faksimile (021)3103705.

## B. PERSYARATAN UMUM

1. Mengajukan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) bidang kepegawaian (BKD/BPSDM/BKPDSDM atau Biro SDM/Biro Kepegawaian);
2. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
3. PNS dengan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SKP terakhir minimal kategori Baik;
4. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - **Dokumen Asli** : Hasil cetak pendaftaran yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja dan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
  - **Salinan/Fotokopi Dokumen** :
    - SK CPNS dan SK PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu.
    - SK Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Pertama.

## C. PELAKSANAAN PELATIHAN

### 1. Pra Pelatihan

Pra pelatihan merupakan salah satu tahapan dari proses seleksi peserta yang dilakukan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Di dalam pra pelatihan, peserta akan diberikan tes pilihan ganda sejumlah 25 soal dalam waktu 50 menit. Peserta harus mencapai nilai batas minimal 70.

### 2. Pelatihan Daring

Setelah dinyatakan lulus pra pelatihan, peserta akan dipanggil untuk mengikuti tahap awal pelatihan yang menyesuaikan dengan jumlah kuota. Pada tahapan ini, peserta akan diberikan materi sebanyak 88jp secara daring.

#### Aktualisasi Pembelajaran

Membekali peserta dengan pengalaman langsung melalui praktik/kunjungan lapangan di instansi/unit kerja masing-masing peserta, membimbing peserta untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam menerapkan teori kebijakan topik pelatihan yang diterima selama pelatihan dengan hasil pengamatan selama melihat praktik

### 3. Pelatihan Luring

Pelatihan akan dilakukan secara luring di program studi pelaksana selama 15 hari (143jp). Peserta akan diberikan materi diantaranya terkait perumusan isu, praktik komunikasi, studi kasus faktual, pembimbingan penulisan serta pemaparan evaluasi pembelajaran.

Lampiran 4: Surat Kesediaan  
Nomor : B-08450/P.01/DL.03.01/05/2024  
Tanggal : 20 Mei 2024

KOP SURAT KANTOR YBS

Nomor : .....  
Lampiran : ..... (berkas)  
Hal : **Kesediaan Pembiayaan  
Pelatihan**  
an.: 1. **Sdr/Sdri. X**  
2. **Sdr/Sdri. Y**  
3. **Sdr/Sdri. Z**

Kepada Yth.:  
**Kepala Pusbindiklatren  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor : ..... tanggal ....., perihal ....., dengan ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr/Sdri. X, Y, Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO	NAMA KARYASISWA	ITEM MANDATORY	ITEM VOLUNTARY	JUMLAH
1	X			
2	Y			
3	Z			

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah

(Cap Basah)

(.....)NIP.

**Catatan:**

Mandatory: adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa: a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi; b) Uang saku

Voluntary: adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** akan ditanggung oleh instansi asal.